

Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Desa Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening

Ica Maulidna Fatimah^{1*}, Deviani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: icamaulidna@gmail.com

Tanggal Masuk:

10 Mei 2023

Tanggal Revisi:

12 Februari 2024

Tanggal Diterima:

15 Februari 2024

Keywords: Allocation of Village Funds; Poverty Rate; Economic Growth.

How to cite (APA 6th style)

Fatimah, I. M., & Deviani. (2024). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Desa Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 314-331.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.876>

Abstract

This study aims to examine the effect of village fund allocation on poverty levels through economic growth. This research is an empirical study of districts/cities in the ten poorest provinces in Indonesia in 2021. This type of research is causal quantitative. The type of data used is secondary data. The secondary data used is data and information on village fund allocations, poverty rates and economic growth through the official BPS website and the village ministry. Methods of data analysis using Path Analysis (Path Analysis). The results of the research on the variable allocation of village funds with a probability value of $0.157 > 0.05$, the allocation of village funds has a positive and insignificant effect on the poverty level of rural communities. The village fund allocation variable has a probability value of $0.375 > 0.05$, so the village fund allocation has no positive and significant effect on economic growth. The economic growth variable with a probability value of $0.000 < 0.05$, means that economic growth has a negative and significant effect on the poverty level of rural communities. Hypothesis testing obtained a calculated t value = $1.1769 < t$ table 1.65 with a significance level of 0.05 , so it can be concluded that the mediation coefficient is 0.030 and there is no intervening influence. The results obtained show that economic growth as an intervening variable has a positive and insignificant effect on the poverty level of rural communities.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Selama empat dekade terakhir, sektor publik di sebagian besar negara telah dibentuk kembali oleh reformasi di bawah payung manajemen publik baru (NPM) (Hood & Jackson, 2013). Keberhasilan NPM mungkin bergantung pada prasyarat kelembagaan, seperti kapasitas negara (misalnya, tingkat kualitas birokrasi dan ketidakberpihakan), mekanisme akuntabilitas (misalnya, aturan transparansi), atau karakteristik manajer dan pegawai publik

(misalnya, rasio gender, atau pengalaman sebelumnya di sektor swasta) (Lapuente & Van de Walle, 2020). Sektor publik mungkin merupakan domain paling mencolok yang di dalamnya perluasan akuntansi telah banyak dipelajari. Akuntansi dalam domain ini dipandang sebagai komponen integral dari apa yang sekarang disebut "New Public Management" (NPM) (Watkins & Arrington, 2007).

Keberhasilan NPM sangat bergantung pada mekanisme akuntabilitas yang efektif. Akuntansi adalah salah satu mekanisme akuntabilitas yang paling penting dalam sektor publik. Akuntansi sektor publik menyediakan informasi yang diperlukan untuk memastikan akuntabilitas publik. Globalisasi memicu revolusi historis dan tak terhindarkan berdampak pada sektor akuntansi. Akibatnya, standarisasi sistem akuntansi menjadi hal yang sukses di bawah era globalisasi. Oleh karena itu, sangatlah jelas bahwa untuk berfungsi optimal dalam ekonomi dunia dan diakui secara internasional, tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri dalam standar pelaporan keuangannya (Ademola et al., 2020). Pengentasan kemiskinan adalah prioritas utama dalam pembangunan global. Manajemen publik perlu fokus pada penyediaan layanan publik untuk masyarakat miskin (McCourt, 2008).

Kemiskinan sampai sekarang masih menjadi permasalahan bagi seluruh negara di dunia, khususnya negara berkembang. Pada tahun 2002 sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan sebuah maklumat yang lebih terkenal dengan Millenium Development Goals (MDGs). MDGs mempunyai beberapa target diantaranya yaitu terwujudnya kesejahteraan rakyat serta pembangunan pada tahun 2015. MDGs berhasil mengeluarkan 70 juta penduduk dunia dari kemiskinan ekstrem, meningkatnya kesehatan melalui ketersediaan akses terhadap air bersih serta kemajuan pendidikan (Ishartono & Raharjo, 2016).

Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di pedesaan berada pada taraf keparahan. Data tersebut menunjukkan kesenjangan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan semakin meningkat dan membutuhkan perhatian pemerintah. Upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mengoptimalkan alokasi dana desa untuk dikelola sebaik mungkin sehingga dapat mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan dengan cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Upaya mengatasi kesenjangan antar wilayah, antar desa dan kota, pemerintah menerapkan paradigma membangun dari pinggiran yang berarti membangun daerah-daerah tertinggal dan kawasan-kawasan perdesaan. Pemerintah percaya pembangunan berbasis perdesaan sangat penting dan perlu untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa mempunyai posisi strategis sebagai basis perubahan sehingga pemerintah Republik Indonesia melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa (Kementerian Keuangan, 2021).

Urusan pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk menjadi kewenangan desa termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Kebijakan dana desa dan alokasi dana desa adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan serta untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dana desa dan alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah dana desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015). Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 melaporkan jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta jiwa setiap tahunnya. Data yang dirilis BPS (2022) menyebutkan bahwa peningkatan angka kemiskinan disebabkan oleh Inflasi, daerah yang masih terisolasi, dan minimnya informasi dan rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan masyarakat desa.

Peringkat tingkat kemiskinan Provinsi pada tahun 2021 dengan persentase kemiskinan di Provinsi Papua adalah 27,12 persen, Papua Barat adalah 21,83 persen, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 20,71 persen, Provinsi Maluku adalah 17,08 persen, Provinsi Gorontalo adalah 15,51 persen, Provinsi Aceh adalah 15,43 persen, Provinsi Bengkulu adalah 14,82 persen, provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 13,98, Provinsi Sumatera Selatan adalah 12,81, dan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 12,59 persen.

Menurut BPS, berbagai permasalahan menjadi penyebab tingkat kemiskinan di Indonesia begitu tinggi, mulai dari minimnya lapangan pekerjaan, banyaknya imigran yang datang ke Indonesia setiap tahun, sampai dengan masalah yang sangat fundamental yaitu mengenai pendidikan dan kesehatan. BPS menjelaskan bahwa perbaikan di sektor tingkat pendidikan, kesehatan dan merupakan kunci utama bagi setiap kabupaten/kota di Indonesia untuk keluar dari jerat kemiskinan yang begitu hebat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa alokasi dana desa mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan desa. Tujuan alokasi dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa. Alokasi dana desa menjadi peluang utama pemerintah desa untuk operasional pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat desa seperti menanggulangi kemiskinan. Belanja desa harus digunakan semaksimal mungkin dalam pengoperasiannya, agar nantinya tujuan utama dapat tercapai yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Kementerian Keuangan (2021).

Upaya mengatasi kesenjangan kemiskinan di desa dilakukan melalui meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Menurut (Mankiw et al., 2014), pertumbuhan ekonomi adalah sejauh mana aktivitas ekonomi akan menyumbang tambahan penghasilan bagi masyarakat pada periode tertentu. Masalah pokok dalam perekonomian Provinsi di Indonesia yakni kemiskinan membuat proses pembangunan daerah menjadi terhambat, untuk itu Pemerintah Daerah dituntut untuk mengurangi angka kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan daerah agar dapat menjalankan program-program tersebut, selain berupaya mengurangi angka kemiskinan Pemerintah juga perlu menopang angka pertumbuhan ekonomi yang ada di sepuluh Provinsi termiskin di Indonesia, karena dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi dapat membantu dalam mempercepat proses pembangunan daerah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek penelitian dan periode penelitian. Pertama, penelitian ini didasari dari Handayani & Badrudin (2019) tentang evaluation of village fund allocation on indonesia dengan sampel 411 kecamatan tahun 2015, sementara penelitian ini menggunakan objek penelitian dengan sampel 144 Kabupaten/Kota di sepuluh Provinsi termiskin di Indonesia tahun 2021. Kedua, fokus penelitian ini yaitu mencoba untuk memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kabupaten/Kota di sepuluh Provinsi termiskin di Indonesia yang mana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya, yakni penggunaan proksi atau pengukuran variabel masih mendapatkan hasil yang tidak konsisten atau berbeda-beda.

Pemilihan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening dalam penelitian ini didasarkan pada teori bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki potensi untuk menjadi penghubung krusial antara alokasi Dana Desa (ADD) dan tingkat kemiskinan di masyarakat desa (Mamonto et al., 2020). Dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, ADD berperan sebagai instrumen penting dalam meningkatkan sumber daya dan infrastruktur desa. Namun, dampak langsung ADD terhadap pengurangan kemiskinan mungkin tidak segera terlihat, mengingat kompleksitas faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terlibat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dengan memasukkan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses bagaimana ADD, melalui pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, dapat secara bertahap

mengurangi tingkat kemiskinan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di sini dianggap sebagai indikator kemajuan ekonomi yang menggambarkan peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai jembatan yang mengarahkan manfaat ADD menuju pengurangan kemiskinan yang lebih signifikan, serta mampu menciptakan lingkungan sosial yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Penelitian ini akan menggunakan *Stewardship theory* sebagai landasan teori. *Stewardship theory* jika dihubungkan dengan alokasi dana desa, maka pemerintah desa diharapkan dapat mengelola alokasi dana desa untuk kepentingan bersama atau masyarakat sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa tidak boleh bertindak untuk tujuan individu sehingga menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang akan merugikan masyarakat serta negara karena alokasi dana desa digunakan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Penggunaan teori *Stewardship* dalam penelitian ini penting karena memfokuskan pada tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks alokasi Dana Desa (ADD), teori ini membantu menganalisis bagaimana tanggung jawab dalam pengelolaan alokasi dana desa memengaruhi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Ini akan mengungkap cara efektif penggunaan alokasi dana desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Integrasi teori *Stewardship* memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang hubungan antara alokasi dana, pertumbuhan ekonomi, dan upaya mengatasi kemiskinan di tingkat desa.

Teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Wahida, 2015). Teori tersebut mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai yaitu mensejahterakan masyarakat.

Berkaitan dengan sektor publik, pemerintah daerah sebagai *steward* dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah berupaya untuk mencapai tujuan bersama yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat. Jika kesejahteraan belum tercapai, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkannya dengan mengurangi angka kemiskinan.

Teori *Stewardship* lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah, sebab instansi pemerintah lebih cenderung kepada memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dan tidak berorientasi pada laba sebagai prinsipnya. Instansi pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemerintah desa. Eksistensi pemerintah desa (*steward*) sebagai organisasi yang dapat dipercaya serta bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat dengan melaksanakan wewenang, fungsi, dan tugasnya dengan tepat demi kesejahteraan masyarakat. Aparatur pemerintah desa memiliki tugas dan tanggung jawab penuh kepada masyarakat desa.

Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa Teori *Stewardship* yang diperankan oleh manajer eksekutif sebagai orang yang berkuasa atas organisasi yang dipimpinnya yang tidak berfokus pada tujuan individu melainkan untuk memberikan arahan yang terkontrol demi kepentingan organisasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Akuntansi dan Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Abdul Halim & Syam Kusufi, 2017) Akuntansi sektor publik mencakup proses manajerial dan pertanggungjawaban. Proses manajerial mencakup proses perencanaan, penganggaran, dan ratifikasi anggaran yang mencakup penentuan pos-pos kegiatan (aktivitas) beserta anggaran dananya, Akuntansi sektor publik sering disebut sebagai akuntansi dana untuk publik. Sedangkan pertanggungjawaban mencakup semua laporan mengenai realisasi anggaran dan kegiatan. Dalam akuntansi sektor publik, anggaran merupakan *focal point* sebagai landasan operasional organisasi.

Menurut (Republik Indonesia, 2014a) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tinjauan Tentang Desa

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 1, menyebutkan desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2014b).

Widjaja (2003) dalam bukunya menyatakan bahwa, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa

Undang-Undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, dana desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Dalam kurun waktu empat tahun pertama (2015-2018), pelaksanaan dana desa telah menghasilkan manfaatnya bagi masyarakat terutama dengan semakin banyaknya infrastruktur perdesaan yang telah dibangun dari dana desa, diantaranya berupa 191,6 ribu km Jalan Desa; 1.140,4 km Jembatan Desa; 9 ribu unit Pasar Desa; 4.175 unit Embung Desa; 24,8 ribu unit Posyandu; 959,6 ribu unit Sarana Air Bersih; 240,6 ribu unit MCK; 9.692 unit Polindes, 50,9 ribu unit PAUD; dan 29,5 juta unit Drainase.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa adalah dengan melibatkan masyarakat dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Manfaat tersebut dapat berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan pelayanan publik (Kementerian Keuangan, 2021).

Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, namun lebih banyak terjadi pada negara-negara berkembang, karena kondisi pembangunan yang masih belum stabil dan sustainable. Pada umumnya kemiskinan diukur dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan pokok minimal suatu Negara (Al- Arif, 2010).

Kemiskinan merupakan kondisi masyarakat yang tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan (Subandi, 2012). Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda beda ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar hidup. BPS menggunakan batas minimum dari besarnya rupiah yang di belanjakan perkapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan di gunakan patokan 2.100 kalori perhari sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa (Mudrajat Kuncoro, 2014).

Garis kemiskinan (GK) menurut ukuran BPS terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM), sehingga jika hal itu diformulasikan maka $GK = GKM + GKNM$. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan (Latumaerissa Julius R, 2015).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita (Astutiningsih & Sari, 2017).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu. Karena itu, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kesejahteraan rakyat. (Sasana, 2009) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan masyarakat di kabupaten atau kota. (Prasetyo, 2012) menegaskan dalam tulisannya bahwa alokasi dana desa mampu meningkatkan kinerja fiskal dan ekonomi regional dan mampu mengurangi jumlah orang miskin dan meningkatkan produk domestik bruto sektor pertanian. Sementara (Ashari, 2013) membuktikan peran alokasi dana desa dalam pengembangan infrastruktur fisik di Desa masih sedikit. Ini menunjukkan, ketika alokasi dana desa dialokasikan dengan benar, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Penggunaan teori Stewardship dalam hubungan antara alokasi Dana Desa (ADD) dan tingkat kemiskinan memberikan pandangan yang kuat terhadap pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Teori Stewardship menekankan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam konteks penelitian ini, teori ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana pemerintah desa dan komunitas menggunakan alokasi dana desa dengan bertanggung jawab untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tanggung jawab dalam alokasi dan penggunaan ADD dapat membentuk fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat, menciptakan peluang kerja, dan memperbaiki akses masyarakat terhadap sumber daya. Ini pada gilirannya dapat membantu mengurangi

tingkat kemiskinan dengan cara yang berkelanjutan, menciptakan dampak jangka panjang yang lebih positif dalam pengembangan desa. Dengan mengintegrasikan konsep Stewardship, penelitian ini akan mengungkap bagaimana tanggung jawab dalam pengelolaan ADD dapat menjadi kunci untuk mengarahkan manfaat dana tersebut menuju peningkatan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan di masyarakat desa.

Tingkat kemiskinan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik lagi yang meliputi peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan, kemudian ditambah dengan peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan, serta perluasan skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa (Todaro & Smith, 2011).

Dana desa dan alokasi dana desa mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Pemerintah sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa dan alokasi dana desa yang diterimanya.

Dalam stewardship theory manajer atau pejabat desa akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan steward dan principals tidak sama, maka steward akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku principals merupakan pertimbangan yang rasional karena steward akan melihat pada usaha dalam mencapai tujuan organisasi (Manik, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sigit & Kosasih, 2020), (Dewi & Novi Irama, 2018), (Putra, 2018), dan (Al Ghozali, 2019) mengenai pengaruh alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan menemukan bahwa dana desa mampu secara efektif menurunkan jumlah penduduk miskin. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pemanfaatan dana desa yang tepat dan efektif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka peluang lapangan kerja baru, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Rimawan & Aryani, 2019). Dalam hal ini, UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa menetapkan bahwa alokasi anggaran untuk desa harus dilakukan secara adil dan merata, sehingga dapat mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata.

Pertumbuhan Ekonomi harus dapat secara signifikan mengurangi jumlah penduduk miskin (Ginting & Dewi, 2013). Selanjutnya dapat mengakomodasi kesenjangan rendah atau distribusi pendapatan yang sama. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya output perkapita jangka panjang (Badrudin, 2017).

Penggunaan teori Stewardship dalam melihat pengaruh alokasi Dana Desa terhadap pertumbuhan ekonomi penting karena teori ini menyoroti tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ADD, teori ini membantu menganalisis bagaimana tanggung jawab dalam penggunaan dana dapat mendorong investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi strategi efektif dalam mengalokasikan ADD untuk merangsang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.

Penelitian (Dydhha, 2017) juga mengemukakan bahwa Dana Desa memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur desa dan terhadap pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa berperan sebagai tambahan dana pembangunan infrastruktur, peningkatan

usaha kecil menengah, pengelolaan bank sampah, dan pelatihan usaha ekonomi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

H2: Alokasi dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi diyakini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan. Namun demikian pengaruh tersebut dapat saja berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Keadaan distribusi pendapatan, jumlah penduduk, urbanisasi memiliki kaitan penting dalam menentukan pengaruh yang terjadi antara pertumbuhan ekonomi dengan penurunan jumlah kemiskinan (Hasan & Quibria, 2002). Menurut (Jonaidi, 2012), terdapat hubungan dua arah yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan, terutama di daerah perdesaan yang banyak terdapat kantong-kantong kemiskinan.

Teori Stewardship menawarkan pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana masyarakat dan pihak berwenang secara kolektif dapat mengelola dan mengembangkan sumber daya ekonomi dengan tanggung jawab. Dalam konteks pengurangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, teori ini memberikan dasar untuk mengelola sumber daya dengan efektif dan mengalokasikannya ke dalam sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan yang inklusif. Prinsip tanggung jawab dan pengelolaan yang berkelanjutan dalam teori Stewardship juga dapat memandu implementasi kebijakan ekonomi yang memprioritaskan kesetaraan dan pemberdayaan ekonomi, membantu masyarakat keluar dari jurang kemiskinan. Oleh karena itu, menggunakan teori Stewardship dapat membuka wawasan tentang bagaimana pengelolaan yang bertanggung jawab atas pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif mengurangi kemiskinan dan memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. (Siregar & Wahyuniarti, 2008) menyebutkan bahwa pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan tersebut adalah pertumbuhan yang berpihak pada masyarakat melalui pembangunan sektor industri dan pertanian yang memiliki pengaruh kuat dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

H3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Alokasi dana desa adalah anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat dan mengimplementasikan pembangunan yang dikelola langsung oleh desa dan masyarakat Prasetyo (2012). Alokasi dana desa merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yang diberikan kepada desa untuk membangun desa. Semakin tinggi dana desa yang disediakan, semakin tinggi tingkat pembangunan desa. Peningkatan tingkat perkembangan ini dapat meningkatkan ekonomi kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, semakin tinggi dana desa, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan mengurangi tingkat kemiskinan. Pendapat ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan UU No. 6 tahun 2014, tentang Desa adalah alokasi anggaran untuk desa yang berasal dari anggaran pusat yang dilakukan secara adil dan merata membuat program berbasis desa efektif.

Stewardship menggambarkan bahwa tidak ada suatu kondisi para manajemen termotivasi untuk tujuan individu melainkan fokus pada kepentingan organisasi (Ikhsan & Suprasto, 2008). Tercapainya keberhasilan dalam pemerintahan dapat dicapai dengan utilitas principals dan manajemen. *Theory stewardship* menyatakan bahwa pemerintah desa

diharapkan dapat mengelola dana desa untuk kepentingan bersama atau masyarakat, sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat dan pemerintah desa tidak boleh bertindak untuk tujuan individu sehingga menyebabkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan merugikan masyarakat serta negara.

Teori Stewardship menekankan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya untuk hasil optimal. Dalam penelitian ini, Stewardship membantu memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh faktor seperti alokasi Dana Desa dapat mengurangi kemiskinan melalui penciptaan pekerjaan dan akses terhadap sumber daya. Integrasi teori ini menggambarkan keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab dan pengurangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Anik Puji Handayani (2019) dalam penelitian berjudul pengaruh alokasi dana desa terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening di Indonesia menemukan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan kabupaten di Indonesia (Handayani & Badrudin, 2019). Oleh karena itu hipotesis penelitian ini adalah:

H4: Alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif kausal. Dalam penelitian ini peneliti akan melihat hubungan antara alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini meneliti objek berupa alokasi dana desa sebagai variabel independen terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* pada Kab/Kota di sepuluh Provinsi termiskin di Indonesia tahun 2021.

Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dan informasi alokasi dana desa, tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi melalui website resmi BPS dan Kementerian desa. Populasi yang digunakan adalah data persentase tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di Kab/Kota Provinsi seluruh Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diambil data yang ada di Badan Pusat Statistik di Sepuluh Provinsi Termiskin di Indonesia Tahun 2021. Teknik pengambilan sampling menggunakan *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan yaitu Analisis Jalur (*Path Analysis*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 1
Uji Normalitas

		LN ADD	LN PPM	LN PE
N		139	139	139
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	25.6582	2.9220	.9448
	Std. Deviation	.55754	.40149	.60619
Most Extreme Differences	Absolute	.062	.072	.074
	Positive	.037	.072	.074
	Negative	-.062	-.066	-.035
Test Statistic		.062	.072	.074
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.076 ^c	.061 ^c

Pada tabel terlihat bahwa masing-masing variabel penelitian yang terdiri dari alokasi dana desa, tingkat kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan nilai asymp sig

(2-tailed) diatas atau sama dengan alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian yang digunakan telah berdistribusi normal.

Tabel 2
Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LN_ADD	.994	1.006
LN_PE	.994	1.006

Berdasarkan hasil olahan data untuk uji multikolinearitas sebagaimana terlihat pada Tabel, diketahui bahwa nilai *tolerance* dari variabel alokasi dana desa, dan pertumbuhan ekonomi lebih besar dari $> 0,1$ dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*) untuk semua variabel bebas lebih kecil dari $< 10,00$ (sepuluh). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang berarti antara sesama variabel bebas.

Tabel 3
Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5.616	.834		6.733	.000
	ADD	7.381E-12	.000	.153	1.799	.074
	PE	-.059	.096	-.052	-.610	.543

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan hasil uji glejser, dapat disimpulkan tidak terjadi kasus heteroskedastisitas karena nilai signifikansi (Sig) $> 0,05$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda tidak ada terjadi kasus heteroskedastisitas, maka penelitian dapat dilanjutkan.

Hasil Uji Hipotesis

Tabel 4
Hail Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.129	1.443		.782	.435
	LN_ADD	.080	.056	.111	1.422	.157
	LN_PE	-.267	.052	-.403	-5.173	.000

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.058	2.377		1.286	.200
	LN_ADD	-.082	.093	-.076	-.889	.375

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat dijelaskan uji t sebagai berikut:

- a. Variabel alokasi dana desa dengan nilai t hitung 1,422 dan nilai (sig= 0,157 > 0,05) dengan df = 139 – 3 = 136 maka diperoleh t tabel sebesar 1,656. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa t hitung < t tabel atau 1,422 < 1,656, artinya Ha ditolak dan H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa.
- b. Variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai t hitung -5,173 dan nilai (sig= 0,000 < 0,05) dengan df = 139 – 3 = 136 maka diperoleh t tabel sebesar 1,656. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa t hitung < t tabel atau -5,173 < 1,656, artinya Ha diterima dan H0 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa.
- c. Variabel alokasi dana desa dengan nilai t hitung -0,889 dan nilai (sig= 0,375 > 0,05) dengan df = 139 – 3 = 136 maka diperoleh t tabel sebesar 1,656. Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa t hitung < t tabel atau -0,889 < 1,656, artinya Ha ditolak dan H0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Tabel 5
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.028	2	2.014	15.037	.000 ^b
Residual	18.216	136	.134		
Total	22.244	138			

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H0 ditolak dan Ha diterima dan sebaliknya jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H0 diterima dan Ha ditolak. Berdasarkan tabel 12 diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $15,037 > 2,67$ dengan nilai signifikan sebesar (sig=0,000 < 0,05). Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel Alokasi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan masyarakat desa.

Tabel 6
Hasil Uji Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.426 ^a	.181	.169	.36598	1.399

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai *Adjusted R-Square* adalah sebesar 0,169. Hal tersebut memiliki arti bahwa variabel independen yaitu Alokasi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi mempengaruhi variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan sebesar 16,9%, sedangkan 83,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan didalam penelitian ini. Artinya Alokasi Dana Desa dan Pertumbuhan Ekonomi cukup memberikan dampak terhadap Tingkat Kemiskinan.

Hasil Analisis Jalur

Tahapan analisis jalur adalah mencari nilai pengaruh langsung dan tidak langsung antar masing-masing variabel. Secara umum tahapan pengolahan secara manual dilakukan sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Analisis Jalur

No	Pengaruh Variabel	Koefisien	Pengaruh		Total	Pengaruh Bersama R ²
			Langsung	Tidak Langsung Melalui Z		
1	X→Y	0,141	0,111	-0,030	0,1416	-
2	X→Z	-0,076	-0,076	-	-0,076	-
3	Z→Y	-0,0411	-0,403	-	-0,403	-
4	ε ₁	0,989	-	-	0,989	-
5	ε ₂	0,911	-	-	0,911	-
6	X+Z→Y	-	-	-	-	0,181

a. Pengaruh Langsung

- 1) Pengaruh Langsung Alokasi Dana Desa (X) Terhadap Tingkat Kemiskinan (Y)
X Terhadap Y = $P_{yx} = 0,111$
- 2) Pengaruh Langsung Alokasi Dana Desa (X) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Z)
X Terhadap Z = $P_{zx} = -0,076$
- 3) Pengaruh Langsung Pertumbuhan Ekonomi (Z) Terhadap Tingkat Kemiskinan (Y)
Z Terhadap Y = $P_{yz} = -0,403$

b. Pengaruh Tidak Langsung Alokasi Dana Desa (X) Terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) Melalui Pertumbuhan Ekonomi (Z)

$$\begin{aligned}
 \text{X Terhadap Y Melalui Z} &= \text{X} \rightarrow \text{Z} \rightarrow \text{Y} \\
 &= (P_{xz})(P_{zy}) \\
 &= (0,076)(-0,403) \\
 &= 0,030
 \end{aligned}$$

Setelah mengetahui nilai koefisien pengaruh tidak langsung atau pengaruh melalui variabel intervening pada masing-masing variabel eksogen dan endogen. Selanjutnya perlu diuji dengan *sobel test* (uji sobel). Perhitungan uji sobel berfungsi untuk mengetahui apakah variabel tersebut signifikan atau tidak. Untuk menghitung tingkat signifikan menggunakan *sobel test* dengan cara hitung standar error dari koefisien *indirect effect*. Rumus uji sobel sebagai berikut :

$$\text{Sob} = \sqrt{b^2 \cdot sa^2 + a^2 \cdot sb^2 + sa^2 \cdot sb^2}$$

$$\text{Sob} = \sqrt{(-0,403)^2 \cdot (0,061)^2 + (0,141)^2 \cdot (0,052)^2 + (0,061)^2 \cdot (0,052)^2}$$

$$\text{Sob} = \sqrt{0,000604 + 0,000054 + 0,000010}$$

$$\text{Sob} = \sqrt{0,000668}$$

$$\text{Sob} = 0,026$$

Dengan demikian nilai uji t diperoleh sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{sob}$$

$$= \frac{-0,030}{0,026}$$

$$= 1,1769$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dimana nilai t hitung = $-1,1769 < t$ tabel dengan tingkat signifikansi 0.05 yaitu sebesar 1,65 maka dapat disimpulkan koefisien intervening 0,030 terdapat pengaruh intervening. Dengan demikian hasil ini tidak mendukung hipotesis 4, yaitu alokasi dana desa berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel alokasi dana desa sebesar 0,080 dengan tingkat *probability* pengujian statistik sebesar 0,157. Nilai koefisien memiliki arah positif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *probability* yaitu $0,157 > 0,05$, maka alokasi dana desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa.

Keterbatasan alokasi dana desa, baik dalam jumlah yang terbatas, distribusi yang tidak merata, maupun prioritas penggunaan yang mungkin tidak sepenuhnya terfokus pada pengentasan kemiskinan, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi hasil penelitian yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara alokasi dana desa dan tingkat kemiskinan. Ketidacukupan dana dapat membatasi pelaksanaan program-program pengurangan kemiskinan, sedangkan distribusi dan prioritas alokasi yang kurang akurat dapat mengurangi efektivitasnya dalam mencapai dampak yang diharapkan terhadap masyarakat desa yang membutuhkan.

Dari hasil data yang telah disajikan, terlihat bahwa tingkat kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa teori kemiskinan sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Menurut (Irma, 2015) dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap penduduk miskin.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Slyke (2006) juga menyatakan bahwa manajemen pemerintah lebih banyak bertindak sebagai *steward* karena dipengaruhi oleh jenis layanan yang diberikan, tingkat kapasitas manajemen publik, jenis insentif dan sanksi yang digunakan, serta frekuensi informasi yang diperlukan. Hal ini yang menyebabkan tingginya alokasi dana desa yang telah ada menjadi tidak optimal dalam hal pengentasan kemiskinan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Herizal & Juliansyah, 2021), (Lalira et al., 2018) menemukan bahwa dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel alokasi dana desa sebesar $-0,889$ dengan tingkat *probability* pengujian statistik sebesar 0,375. Nilai koefisien memiliki arah negatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *probability* yaitu $0,375 > 0,05$, maka alokasi dana desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Alokasi dana desa dapat dipandang dari perspektif teori *stewardship* dalam konteks pengelolaan sumber daya organisasi di level desa. Pemerintah desa sebagai pengelola dana desa bertanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja desa melalui penggunaan dana desa secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini akan berdampak terhadap tujuan akhir Dana Desa yaitu untuk memaksimalkan pencapaian kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari baik tidaknya akuntabilitas kinerja (Mahsun, 2006).

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian (Chandoevrit & Ashakul, 2008) yang menunjukkan bahwa program *village fund* tidak berdampak terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan. Pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat menjadi dasar ukuran

kemakmuran suatu wilayah dalam hal ini wilayah pedesaan, karena pendapatan masyarakat dapat membiayai kebutuhan hidup masyarakat tersebut. Apabila stimulus berupa *village fund* ternyata tidak berdampak terhadap pendapatan rumah tangga pedesaan, maka hal ini berarti *village fund* juga tidak berdampak terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

Perlu peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan jalan membuka ruang bagi investasi terutama sektor yang menjadi prioritas di masing-masing kabupaten dan tidak hanya bertumpu pada Alokasi Dana Desa. Alasan hipotesis ini ditolak jika alokasi dana desa tidak diarahkan pada sektor-sektor yang potensial untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, maka dapat dianggap sebagai kurangnya tanggung jawab pengelolaan dana desa oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,267$ dengan tingkat *probability* pengujian statistik sebesar $0,000$. Nilai koefisien memiliki arah negatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai *probability* yaitu $0,000 < 0,05$, maka pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa.

Teori *stewardship* mengasumsikan bahwa tindakan manajemen mengarah pada kebutuhan kolektif demi kepentingan organisasi (Keay, 2017). Asumsi mengenai teori ini dibangun berdasarkan sifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya (Kaihatu, 2006). Konsep inti dari teori *stewardship* ini adalah kepercayaan. Hal ini yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam memberantas kemiskinan.

Penelitian sejalan yang dilakukan oleh (Niyimbanira, 2017) dengan judul “*Analysis of the Impact of Economic Growth on Income Inequality and Poverty in South Africa: The Case of Mpumalanga Province*” didapatkan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan tetapi bukan ketimpangan pendapatan. Temuan penelitian ini berimplikasi pada pembuat kebijakan untuk merancang strategi mengurangi ketimpangan pendapatan di Afrika Selatan.

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis diperoleh nilai t hitung = $1,1769 > 1,65$ dengan tingkat signifikansi 0.05 . Maka dapat disimpulkan koefisien intervening sebesar $0,030$ tidak terdapat pengaruh intervening. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa.

Asumsi mengenai hal ini menunjukkan bahwa nilai pengaruh langsung tidak lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berfungsi sebagai variabel intervening terhadap kemiskinan.

(Siregar & Wahyuniarti, 2008) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan bagi pengurangan kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan tersebut efektif dalam mengurangi kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu di pastikan terjadi di sektor sektor dimana penduduk miskin bekerja (pertanian atau sektor padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif merdistribusi manfaat pertumbuhan yang boleh jadi didapatkan dari sektor moderen seperti jasa dan manufaktur yang padat modal

Kesepakatan yang terjadi antara *steward* dan *principal* didasari kepercayaan sesuai dengan tujuan organisasi, dalam hal ini adalah memberikan pelayanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Dengan pengalokasian dana desa dapat memberikan peningkatan untuk pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai wadah yang dapat dimanfaatkan dalam penyaluran dana desa untuk kesejahteraan masyarakat khususnya untuk mengurangi angka kemiskinan.

Selanjutnya penelitian berbeda yang dilakukan oleh Rimawan dan Aryani (2019) menunjukkan bahwa Alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia sedangkan alokasi dana desa tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Rimawan & Aryani, 2019)

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Sesuai dengan analisis hasil dan pembahasan maka peneliti mengajukan beberapa kesimpulan penting yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Alokasi dana desa berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa. Artinya alokasi dana desa meningkat namun tingkat kemiskinan masyarakat desa masih meningkat. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan ditolak.
2. Alokasi dana desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Artinya alokasi dana desa meningkat namun pertumbuhan ekonomi masyarakat desa masih menurun. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan alokasi dana desa berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi ditolak.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa. Artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat kemiskinan masyarakat desa menurun. Sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan diterima.
4. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening pada alokasi dana desa terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa. Sehingga hipotesis keempat yang menyatakan alokasi dana desa berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi ditolak.

Keterbatasan

Keterbatasan yang ada pada penelitian ini adalah menambahkan indikator lain seperti variabel pengangguran dan indeks gini setiap kabupaten.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan di atas, dari penelitian ini peneliti menyarankan beberapa hal berikut:

1. Dalam mengalokasikan dana desa, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas program, seperti keterbatasan infrastruktur, partisipasi masyarakat yang kurang, perbedaan kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta kebutuhan program-program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan ekonomi di wilayah desa dengan memberikan dukungan dan fasilitas yang memadai, seperti akses terhadap pembiayaan, pelatihan, infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan masyarakat desa. Perlu dilakukan upaya lainnya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Salah satu saran yang bisa dilakukan adalah meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi masyarakat desa sehingga mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim & Syam Kusufi. (2017). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi. Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Al- Arif, M. N. R. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank. Syariah*. ALFABETA.
- Al Ghozali, S. M. (2019). *Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Sendang Agung dalam Perspektif Ekonomi Islam*. UIN Raden Intan Lampung.
- Ashari, B. (2013). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Budaya Organisasi dan Struktur Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Agam). In *Jurnal Akuntansi*. Negeri Padang.
- Astutiningsih, S. E., & Sari, C. M. (2017). Pemberdayaan Kelompok Agroindustri Dalam Upaya Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 2(1), 1–9.
- Badrudin, R. (2017). *Ekonomika Otonomi Daerah Edisi-2. UPP STIM YKPN*.
- Chandoevrit, W., & Ashakul, B. (2008). The impact of the village fund on rural households. *TDRI Quarterly Review*, 23(2), 9–16.
- Dewi, R. S., & Novi Irama, O. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kemiskinan : Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 11–18.
- Dydhya, D. O. (2017). *Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik)*. Universitas Brawijaya.
- Ginting, A. M., & Dewi, G. P. (2013). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor Keuangan terhadap Pengurangan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 4(2), 117–130.
- Handayani, A. P., & Badrudin, R. (2019). Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3), 283–295. <https://doi.org/10.18196/jai.2003129>
- Hasan, R., & Quibria, M. G. (2002). *Poverty and Patterns of Growth*. ERD Working Paper Series.
- Herizal, H., & Juliansyah, H. (2021). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah Dan Indek Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Kab/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 10(2), 15.
- Ikhsan, A., & Suprasto, H. B. (2008). *Teori Akuntansi & Riset Multiparadigma*.

- Irma, A. (2015). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Add) di kecamatan dolo selatan kabupaten sigi. *Katalogis*, 3(1).
- Ishartono, & Raharjo. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Vol. 6 No, 2*.
- Jonaidi, A. (2012). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. *Kajian Ekonomi*, 1(1), 140–164.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good corporate governance dan penerapannya di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(1), 1–9.
- Keay, A. (2017). Stewardship theory: is board accountability necessary? *International Journal of Law and Management*.
- Kementerian Keuangan. (2021). *Dana Desa Pengertian Sumber Dana Penyaluran Dana dan Prioritasnya*.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. F. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(4), 62–72.
- Latumaerissa Julius R. (2015). *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika* (E. Global (ed.)). Mitra Wacana Media.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. *Yogyakarta: BPF*.
- Manik, J. (2019). The Political Law Management of the Sea and Coastal Area in Indonesia. *International Conference on Maritime and Archipelago (ICoMA 2018)*, 158–161.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2014). Pengantar Ekonomi Mikro Principles of Economics. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Mudrajat Kuncoro. (2014). *Ekonomi pembangunan: teori, masalah, dan kebijakan*. Erlangga.
- Niyimbanira, F. (2017). Analysis of the impact of economic growth on income inequality and poverty in South Africa: the case of Mpumalanga Province. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(4), 254–261.
- Prasetyo, E. (2012). *Data Mining Konsep dan Aplikasi Menggunakan Matlab, Andi. Offset* (Andi. Offs).
- Putra, H. S. (2018). Pengaruh Dana Desa Terhadap Kemiskinan Di Aceh. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 2(2).
- Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa*.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295.
- Rismawati, T. (2019). *Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, partisipasi masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*. Skripsi, universitas muhammadiyah magelang.
- Sasana, H. (2009). Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 10(1), 103–124.
- Sigit, T. A., & Kosasih, A. (2020). Pengaruh Dana Desa terhadap Kemiskinan: Studi Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2008). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. *Jurnal Ilmiah*, 24–40.
- Subandi. (2012). *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development: The developed and developing World*. Boston, MA: Addison-Wesley.
- Wahida, N. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utara*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Widjaja. (2003). *Otonomi Desa*. PT Raja Grafindo Persada.